

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bendahara di SKPD Kota Pariaman sebahagian besar berlatar belakang pendidikan Non Ekonomi. Dari segi pengalaman sebelum menjabat bendahara di SKPD Kota Pariaman responden kebanyakan tidak pernah menjabat sebagai pembantu (staf) Bendahara ataupun Bendahara Pembantu. Pelatihan yang diikuti oleh responden sebelum menjabat sebagai bendahara di SKPD Kota Pariaman masih sedikit dibandingkan setelah menjabat sebagai bendahara.
2. Pada umumnya Bendahara di SKPD Kabupaten Tanah Datar berlatar belakang pendidikan Ekonomi. Sebahagian besar sebelum menjabat bendahara di SKPD Kabupaten Tanah Datar responden tidak punya pengalaman sebagai pembantu (staf) Bendahara ataupun Bendahara Pembantu. Di SKPD Kabupaten Tanah Datar Pelatihan yang diberikan untuk bendahara sebelum menjadi bendahara masih sangat minim, namun setelah menjadi bendaharapun tidak ada pelatihan yang diikuti untuk mendukung tugas pokok dan fungsi terkait perbendaharaan tersebut.
3. Untuk hasil perbandingan latar belakang pendidikan, pengalaman dan pelatihan bendahara di Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan sebagai berikut ;
 - a. Latar belakang pendidikan bendahara di Kota Pariaman berbeda secara nyata dengan latar belakang pendidikan bendahara di Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Pengalaman bendahara di Kota Pariaman tidak berbeda secara signifikan dengan pengalaman bendahara di Kabupaten Tanah Datar.
 - c. Pelatihan yang diikuti sebelum menjabat sebagai bendahara di Kota Pariaman tidak berbeda secara signifikan dengan pelatihan yang diikuti sebelum menjabat sebagai bendahara di Kabupaten Tanah Datar. Pelatihan yang diikuti setelah menjabat sebagai bendahara di Kota

Pariaman berbeda secara nyata dengan pelatihan yang diikuti setelah menjabat sebagai bendahara di Kabupaten Tanah Datar.

B. SARAN

1. Latar belakang pendidikan harus mejadi acuan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusulkan bendahara di SKPD terkait.
2. Perlu adanya pengalaman sebagai pembantu (staf) bendahara dan pembantu bendahara sebelum seseorang diangkat menjadi bendahara.
3. Pemerintah Daerah perlu menyediakan anggaran dan pelatihan yang memadai untuk bendahara terkait bidang tugas bendahara seperti pelatihan penatausahaan keuangan, pelatihan pembukuan (BKU), pelatihan perpajakan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa.

